



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS MULAWARMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUKARTININGSIH
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG UMUM, SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEUANGAN
3. NHK : 807889

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.676.686.500**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 252 m2/252 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 40.160.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 32.175.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 252 m2/252 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 40.320.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 242 m2/252 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 40.320.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 67.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 17.755 m2/17.755 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 43.499.750
7. Tanah dan Bangunan Seluas 20.721 m2/20.721 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 50.766.450
8. Tanah dan Bangunan Seluas 27.577 m2/27.577 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 46.880.900
9. Tanah dan Bangunan Seluas 26.907 m2/26.907 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 45.791.900
10. Tanah dan Bangunan Seluas 17.544 m2/17.544 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 29.824.800
11. Tanah dan Bangunan Seluas 5.464 m2/5.464 m2 di KAB / KOTA



KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 9.200.800

12. Tanah dan Bangunan Seluas 16.799 m2/16.799 m2 di KAB / KOTA

KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 28.558.300

13. Tanah dan Bangunan Seluas 27.758 m2/27.758 m2 di KAB / KOTA

KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 47.188.600

14. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA

SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 48.600.000

15. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA

SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 48.600.000

16. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA

SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 48.600.000

17. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA

BONTANG , HASIL SENDIRI Rp. 48.600.000

18. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA

SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 48.600.000

19. Tanah Seluas 314 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL

SENDIRI Rp. 117.000.000

20. Tanah Seluas 255 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL

SENDIRI Rp. 117.000.000

21. Tanah Seluas 90 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL

SENDIRI Rp. 208.000.000

22. Tanah Seluas 538 m2 di KAB / KOTA BLITAR, HASIL SENDIRI Rp.

470.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

33.000.000

1. MOTOR, HONDA H1B02N41L0 A/T / SOLO Tahun 2023, HASIL

SENDIRI Rp. 15.000.000

2. MOTOR, HONDA F1C02N46L0 A/T / SOLO Tahun 2023, HASIL

SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

D. SURAT BERHARGA

Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

265.887.500

F. HARTA LAINNYA

Rp.

75.000.000

Sub Total

Rp.

2.050.574.000

III. HUTANG

Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.050.574.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.